



Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Pacu Jalur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi

Ego Pernanda Saputra

Universitas Riau

ego.pernanda0342@student.unri.ac.id

Adianto Adianto

Universitas Riau

adianto@lecturer.unri.ac.id

Alamat Kampus : Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Panam, Kota Pekanbaru, Riau 28293.

Korespondensi penulis : ego.pernanda0342@student.unri.ac.id

Abstract. *Currently tourism in Indonesia is growing very rapidly. The role of stakeholders is very necessary in planning a tourist destination because it can help to develop tourism potential in a village. This research focuses on discussing community based tourism development collaboration at Pacu jalur events in Kuantan Singingi Regency and what factors inhibit collaboration in community-based tourism development at Pacu jalur events in Kuantan Singingi Regency. The aim of this research is to find out how collaborative community based tourism development is at the pacu jalur event in Kuantan Singingi Regency and what are the inhibiting factors for collaboration in community based tourism development at the pacu Jalur event in Kuantan Singingi Regency using the pentahelix model of 5 stakeholders. This study used qualitative research is descriptive methods. This research found that the roles of each stakeholder are: academics focus on tourism planning based on existing theories, the government focuses on policy makers in developing tourism potential, business actors as nails in creating added value and maintaining economic growth in the surrounding area, and the role of the community is to help manage tourism potential and the role of the media is to promote and help inform the wider community about the spur route. The research results found that collaborative governance has run quite optimally. The inhibiting factors in community-based tourism development collaboration were also revealed, namely, a) Lack of pentahelix coordinators in the development of Pacu jalur tourism, b) Lack of support for road infrastructure access in the development of Pacu jalur tourism, c) Low creativity and innovation at Pacu jalur tourism locations. Through this research, it can be used as an evaluation so that it can increase the efforts of the Department of Tourism and Culture in developing tourist attractions leading to national events. Then put more effort into establishing cooperation between local government, the community and the private sector in developing tourism destinations, especially pacu jalur. For the people of Kuantan Singingi Regency, whether they live in the tourist area or not, to work together with the local government in developing a tourism destination for the pacu jalur.*

Keywords: *collaboration, pentahelix model, tourism development.*

Abstrak. Saat ini pariwisata di Indonesia berkembang sangat pesat. Peranan pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam hal perencanaan suatu destinasi wisata karena dapat membantu untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di suatu desa. Penelitian ini fokus membahas kolaborasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada event pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi dan faktor-faktor penghambat kolaborasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada event pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada event pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi dan apa saja faktor-faktor penghambat kolaborasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat pada event pacu jalur di Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan model pentahelix dari 5 pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian ini menemukan peran masing-masing pemangku kepentingan adalah: akademisi fokus pada perencanaan pariwisata berdasarkan teori-teori yang ada, pemerintah fokus pada pengambil kebijakan dalam mengembangkan potensi pariwisata, pelaku bisnis sebagai paku dalam menciptakan nilai tambah dan menjaga pertumbuhan ekonomi di sekitarnya, dan peran masyarakat adalah membantu mengelola potensi wisata dan peran media adalah mempromosikan dan membantu menginformasikan kepada masyarakat luas tentang pacu jalur. Hasil penelitian menemukan bahwa tata kelola kolaboratif telah berjalan cukup optimal. Diungkapkan pula faktor penghambat di kolaborasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yaitu, a) Kurangnya koordinator pentahelix dalam pengembangan pariwisata pacu jalur, b) Kurangnya dukungan akses infrastruktur jalan dalam pengembangan pariwisata pacu jalur, c) Rendahnya kreativitas dan inovasi di lokasi wisata Pacu jalur. Melalui penelitian ini dapat dijadikan evaluasi sehingga dapat meningkatkan upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan obyek wisata pacu jalur menuju event nasional. Kemudian lebih berusaha dalam menjalin kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan destinasi pariwisata khususnya pacu jalur. Bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi baik yang tinggal dikawasan wisata atau pun tidak untuk saling bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi pariwisata pacu jalur.

Kata Kunci: kolaborasi, model pentahelix, pengembangan pariwisata.

LATAR BELAKANG

Pacu Jalur adalah Pesta Rakyat kebanggaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Sejarah Pacu Jalur berawal abad ke-17, di mana jalur merupakan alat transportasi utama warga desa di Rantau Kuantan, yakni daerah di sepanjang Sungai Kuantan yang terletak antara Kecamatan Hulu Kuantan di bagian hulu, hingga Kecamatan Cerenti Kecamatan Cerenti di hilir. Saat itu memang belum berkembang transportasi darat. Akibatnya jalur itu benar-benar digunakan sebagai alat angkut penting bagi warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi, seperti pisang dan tebu, serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 40-60 orang. Kemudian muncul jalur-jalur yang diberi ukiran indah, seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau, baik di bagian lambung maupun selembayung-nya, ditambah lagi dengan perlengkapan payung, tali-temali, selendang, tiang tengah (gulung-gulang) serta lambai-lambai (tempat juru mudi berdiri).

Pada awalnya, pacu jalur diselenggarakan di kampung-kampung di sepanjang Sungai Kuantan untuk memperingati hari besar Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, akhirnya Pacu Jalur diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu Pacu Jalur diadakan sekitar bulan Agustus. Dapat digambarkan saat hari berlangsungnya Pacu Jalur, kota Jalur bagaikan lautan manusia. Terjadi kemacetan lalu lintas di mana-mana, dan masyarakat yang ada diperantauan akan terlihat lagi, mereka akan kembali hanya untuk menyaksikan acara ini. Biasanya jalur yang mengikuti perlombaan, bisa mencapai lebih dari 100. Menurut masyarakat setempat jalur adalah 'perahu besar' terbuat dari kayu bulat tanpa sambungan dengan kapasitas 45-60 orang pendayung (anak pacu). Perlombaan yang konon sudah ada sejak tahun 1903 ini menjadi agenda tetap Pemerintah Provinsi Riau untuk menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke Riau, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Budaya Pacu jalur menurut sejarah sudah mulai dikenal oleh masyarakat Rantau Kuantan sekitar tahun 1900, akan tetapi masih sangat sederhana sekali, sekitar tahun ini yang di pacukan penduduk kebanyakan perahu_perahu besaryang biasa dipakai untuk mengangkut hasil bumi, seperti tebu, pisang danlain-lain. Perahu ini dipacukan di kampung sepanjang Rantau Kuantan. Untuk merayakan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, 1 Muharram dan sebagainya. Belum begitu meriah seperti sekarang ini. Tradisi Pacu jalur adalah tradisi yang sudah turun temurun bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Karena, usia pacu jalur ini sudah lebih dari satu abad lamanya. Tradisi ini disaksikan mayoritas masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Mereka tidak terlalu menghiraukan jarak

tempuh yang jauh dari tempat tinggal mereka. Untuk datang menyaksikan perlombaan pacu jalur. Sebab ini adalah tradisi dan tontonan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada saat ini Pacu jalur semakin mencuat kepermukaan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan badan pemerintah setempat saja, tetapi juga merangkul kepala pemerintahan provinsi yaitu Gubernur. Seiring dengan itu pula Pacu jalur semakin menampilkan potensinya sebagai kekayaan budaya di Kuantan Singingi. Faktor pendukung yang membuat pacu jalur semakin berkembang diantaranya adalah pacu jalur ini telah terdaftar di kalender pariwisata kabupaten kuantan Singingi dan agenda pariwisata nasional yang diadakan setiap tahun. Yang kedua banyaknya sponsor yang ambil andil dalam festival pacu jalur ini. Ketiga, selain pacu jalur panitia juga mengadakan seperti pentas seni dan panggung hiburan yang diadakan pada malam harinya.

Peserta Pacu jalur yang antusias dalam event tahunan tersebut dapat kita bayangkan dengan banyaknya peserta yang hadir, dapat mengundang lebih banyak pengunjung untuk datang ke Teluk kuantan, Pacu jalur tradisional Kuantan Singingi juga sudah dapat penghargaan sebagai pariwisata terpopuler Indonesia di ajang Anugrah piala Indonesia (API) pada tanggal 4 Desember 2017 penyerahan piala API dari Kementrian Pariwisata diterima langsung oleh Bupati Kuantan Singingi Drs. H. Mursini, M.Si di siarkan langsung oleh saluran Televisi Metro Tv.

Bentuk kegiatan promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2002 sampai sekarang dalam mempromosikan budaya Pacu Jalur kepada calon wisatawan lokal maupun mancanegara meliputi penggunaan media cetak, elektronik dan media on-line, penggunaan media cetak, Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Riau Pos sedangkan penggunaan media elektronik bekerjasama dengan Riau Televisi (RTV), dua media ini di fokuskan kepada calon wisatawan lokal. Dalam hal ini publikasi budaya Pacu Jalur kepada calon wisatawan di luar pulau Sumatera dan mancanegara dengan menggunakan media on-line seperti sosial media Instagram, Youtube dan Facebook yang bertujuan menginformasikan akan keberadaan event budaya tahunan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan web resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, seluruh kegiatan promosi dilakukan oleh seksi promosi dan pemasaran pariwisata.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan wisata dengan motif wisata budaya pacu jalur, tapi juga dapat dilihat pada

tahun 2020 dan 2021 tidak adanya peningkatan pengunjung pacu jalur dikarenakan pada tahun tersebut tidak dilaksanakan Festival Pacu Jalur disebabkan oleh Covid-19 yang mengakibatkan aktivitas masyarakat yang mengundang banyak orang dihentikan. Pada tahun 2022 setelah 2 tahun berturut-turut tidak dilaksanakan Festival Pacu Jalur terlihat melonjaknya pengunjung atau wisatawan untuk hadir dan mengikuti Festival Pacu Jalur.

KAJIAN TEORITIS

1. Pentahelix

Unsur Pentahelix ini semula berupa Triple Helix dengan unsur-unsur Academics, Business Sector, Government yang kemudian ditambahkan dengan satu unsur, Civil Society (Communities dalam penelitian ini), menjadi Quadruple Helix, untuk mengakomodasi perspektif masyarakat, dalam hal ini merupakan “masyarakat berbasis media dan budaya” yang juga telah menjadi bagian menyeluruh dari inovasi di Abad-21 kini. Lebih jauh lagi, unsur Communities membuka peluang konfigurasi dan jejaring lintas disiplin, serta membebaskan konsep “inovasi” dari sekedar pertimbangan dan tujuan ekonomi, melainkan juga melibatkan kreativitas sebagai bagian dari proses produksi pengetahuan dan inovasi (Muhyi, Chan, Sukoco, & Herawaty, 2017).

Strategi Pentahelix merupakan konsep kolaborasi yang pertamakali diperkenalkan oleh Menteri Pariwisata periode tahun 2014-2019 Arif Yahya, yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan. Dalam peraturan ini dituliskan bahwa dorongan sistem kepariwisataan diperlukan melalui optimasi peran Academician (Akademisi), Business (Bisnis), Community (Komunitas), Government (Pemerintahan), dan Media (Publikasi) atau biasa disingkat menjadi ABCGM agar dapat terintegrasi dengan baik dan menciptakan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, serta pengalaman, dan nilai manfaat kepariwisataan agar dapat memberikan keuntungan dan manfaat pada lingkungan dan masyarakat.

Menurut Lindmark dkk dalam Rahu (2021:18) strategi Pentahelix merupakan strategi dalam dunia pariwisata yang melibatkan unsur-unsur masyarakat serta lembaga non-profit untuk mewujudkan suatu inovasi didukung dengan sumberdaya dan potensi wisata yang ada. Strategi Pentahelix pada pariwisata di Indonesia dikenal dengan strategi ABCGM singkatan dari (Academic, Business, Community, Government and Media). Strategi Pentahelix yang merupakan kegiatan kerja sama antar lini/bidang Academic, Business, Community,

Government, dan Media, atau dikenal sebagai ABCGM diketahui akan mempercepat pengembangan potensi di desa wiata yang cukup besar (Rahu,2021:18).

2. Kolaborasi

Emerson, Nabatchi dan Balogh dalam Adianto dkk (2020) mengatakan mengenai kolaborasi yang berlangsung penetapan lebih substantif dilakukan secara terus menerus karena sifatnya lebih dibutuhkan. Sementara itu, jika dilihat dari praktiknya, tekad dapat diwujudkan melalui musyawarah mufakat sebagai metode fundamental pembentukan tekad bersama. Kesimpulannya, gerakan prinsip umum adalah dibentuk dan dipelihara oleh proses pengungkapan, pertimbangan, dan tekad yang interaktif. Dengan demikian keefektifan menggerakkan prinsip bersama ditentukan oleh kualitas masing-masing dan ada beberapa kualitas yang dapat dijadikan pedoman dalam berkolaborasi, sebagai berikut :

1. Motivasi Bersama

Motivasi bersama hampir dalam dimensi yang sama dengan proses kolaboratif yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash, kecuali legitimasinya. Motivasi bersama menekankan pada elemen interpersonal dan realistik dari dinamika kolaborasi yang kadang disebut sebagai modal sosial. Komponen ini diprakarsai oleh tindakan prinsip-prinsip umum adalah hasil jangka menengah, tetapi menurut Huxham dan Vagen dalam Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), motivasi bersama juga memperkuat dan meningkatkan proses mengemudikan prinsip bersama.

2. Saling Percaya

Elemen pertama dari motivasi bersama adalah pengembangan rasa saling percaya. Menurut Fisher dan Brown dalam Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), rasa saling percaya akan berkembang seiring dengan keterlibatan para pihak saat berkolaborasi, saling mengenal dan membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab dan dapat diandalkan.

3. Saling Pengertian

Saling pengertian menciptakan kepercayaan kepada pemangku kepentingan lainnya. “Mutual understanding” tidak sama dengan “shared understanding” yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Pemahaman bersama adalah suatu kondisi dimana semua pemangku kepentingan menyepakati tujuan dan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Sedangkan mutual understanding lebih ke arah mutual understanding yang dimaksudkan agar sesama stakeholder saling memahami dan menghargai posisi dan kepentingan stakeholder lainnya

meskipun stakeholder tersebut tidak sependapat, atau memiliki kesepahaman, pembentukan seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan yang dimiliki. telah terbentuk dalam kerjasama tersebut.

4. Legitimasi Interal

Legitimasi internal adalah pengakuan yang berasal dari kolaborasi internal. Dalam hal ini aktor-aktor yang bekerjasama dituntut untuk dapat dipercaya dan kredibel terhadap kepentingan bersama. Aktor kolaboratif harus menyadari bahwa ada rasa ketergantungan antar aktor yang menciptakan kolaborasi berkelanjutan. Legitimasi internal, saling pengertian, dan saling percaya merupakan tiga unsur yang erat kaitannya satu sama lain dalam komponen motivasi timbal balik sehingga unsur berikutnya yaitu komitmen sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kualitas ketiga unsur tersebut.

5. Komitmen

Komitmen dalam proses kolaboratif dapat menghilangkan hambatan yang sering muncul akibat perbedaan karakteristik dan kepentingan antar aktor. Komitmen membuat para aktor berinteraksi lintas organisasi untuk membentuk komitmen bersama. Analisis kualitas pembentukan komitmen setiap aktor kolaborasi dapat dilihat dari tujuan masing-masing untuk bergabung dalam kolaborasi tersebut, selain itu ada sikap optimis yang harus dimiliki oleh semua aktor.

3. Peran Pemerintah dalam Kolaborasi Pengembangan Kepariwisata

Pemerintah pada hal ini berperan sebagai pembuat regulasi sekaligus sebagai pemantau dan yang memiliki hak-hak atas pembuatan peraturan-peraturan serta memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan potensi wisata. Dalam hal ini pemerintah juga melibatkan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan segala sesuatu seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, undang-undang, dll. Pemerintah juga sangat berperan dalam pengkoordinasian antar pemaku kepentingan dalam melakukan perencanaannya.

Konsep kolaborasi yang dilakukan sering dikenal dengan istilah collaborative governance yang juga telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Permenparenkraf) Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Permenpar ini menjelaskan bahwa untuk menciptakan orkestrasi dan memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan

lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran bussiness, government, community, academic, and media (Putra dkk, 2022).

Hatifah dalam Arifin Tahir (2015) mengatakan bahwa konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang paling menentukan. Ini berarti bahwa implikasi dari governance, peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta ikut aktif melaksanakan upaya tersebut. Hal ini diperkuat dengan pendapat Andrew dalam Wirman Syafri (2012) yang memaknai governance sebagai cara dimana pemerintah bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dalam masyarakat, menerapkan kewenangan dan mempengaruhi dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat dan tujuan jangka panjang suatu bangsa. Boon dan Geraldine masih dalam Wirman Syafri (2012) memaknai governance sebagai penentuan berbagai kebijakan, institusi, dan struktur yang secara bersama mendorong untuk memudahkan interaksi kearah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik.

Istilah collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007) didefenisikan sebagai berikut : “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public program or assets.” merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stakeholder di luar negara, berorientasi konsensus, dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik. Fokus collaborative governance adalah pada kebijakan dan masalah publik. Walaupun lembaga publik memiliki otoritas tertinggi dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus di antara para stakeholders (bukan penekanan pada lembaga publik). Collaborative Governance menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik (Setyoko, dalam Wirman Syafri, 2012).

Kolaborasi pemerintahan memberikan jaminan akan lebih partisipatifnya proses perumusan kebijakan sehingga keluaran yang dihasilkan akan memberikan dampak lebih luas di masyarakat. Collaborative Governance adalah sistem tata pemerintahan dengan aktor institusi publik yang secara langsung melibatkan aktor non-state dalam proses pengambilan keputusan bersama secara formal, serta berorientasi konsensus dan sinergis (Ansell dan Gash

dalam Erwan, 2015). Lalu secara lebih spesifik Robertson dan Choi dalam Erwan (2015) 2009 mendefinisikan collaborative governance sebagai proses kolektif dan egalitarian dengan setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substantif dalam pengambilan keputusan dan setiap pemangku kepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.

Collaborative governance membedakan dirinya dengan partnership melalui peran pemerintah di dalamnya. Dalam partnership, pemerintah bekerja dengan membangun jejaring, koalisi, dan kemitraan yang bertujuan menciptakan pelayanan yang efektif dengan relasi government to citizen. Pada collaborative governance, pemerintah bekerja melalui sektor privat dan elemen masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan publik (O'Flynn dan Wanna dalam Erwan, 2015).

Kriteria dalam collaborative governance mengimplikasikan peran aktor nonpublik untuk memiliki responsibilitas pada keluaran kebijakan. Oleh karena itu, interaksi di dalamnya mengharuskan aktor-aktor tersebut secara langsung terlibat dalam pembuatan keputusan dalam bentuk two-way flows and influence. Menurut Walter dan Peter dalam Erwan (2015) menyebut collaborative governance sebagai aktivitas yang tidak hanya melibatkan pengambilan keputusan, tetapi juga meliputi joint activities, joint structures, dan shared resources.

Tata kelola Pemerintahan-Governance yang menggunakan prinsip kolaborasi-Collaborative governance pada akhir-akhir ini muncul sebagai konsep alternatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal ketika permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin kompleks (O'Leary, 2008), sementara birokrasi sebagai aktor tunggal pelaksana semakin terseok dan terbelenggu dengan segala keterbatasan dan patologi yang menghinggapinya. Kolaborasi dalam governance diartikan sebagai proses fasilitasi dan pelaksanaan terhadap pengaturan peran multi organisasi terhadap masalah yang tidak mampu dipecahkan oleh organisasi tunggal.

Kunci dari pelaksanaan Collaborative Governance dalam aspek pariwisata adalah kerja sama multi sektor. Tata kelola kolaboratif didefinisikan sebagai “struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan orang-orang secara konstruktif melintasi batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, ruang publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan publik. Tujuan yang tidak dapat dicapai dengan cara lain. Fennel (1999) dalam Lokantara & Rafi'I (2017) menerangkan bahwa pariwisata pariwisata dipandang

sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan seperti; komponen ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Pariwisata sebagai sebuah sistem tidak dapat dipisahkan dari sistem lainnya terjadi hubungan interconnectedness atau saling ketergantungan.

Menggunakan prinsip kolaborasi dalam tataran pemerintahan tingkat lokal dikatakan menjadi alternatif terbaik ketika pemerintah daerah menghadapi tantangan yang makin kompleks. Di sisi lain tumbuhnya kemitraan antara publik swasta, semakin pentingnya peran lembaga non pemerintah, tumbuhnya jiwa voluntir suka rela di kalangan masyarakat menjadikan proses kolaborasi dapat tumbuh subur dengan menggunakan kekuatan-kekuatan ini. Kepemimpinan kolaboratif menjadi penting ketika kegiatan yang dilakukan melibatkan hubungan antar pemerintah (lokal--regional-nasional), hubungan antar organisasi, antar sektor dan apabila melibatkan organisasi skala internasional (Kim, 2009).

4. Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang terdiri dari beragam komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Ketika pariwisata dipandang sebagai sebuah sistem, maka analisis tentang kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, sosial ekonomi, budaya dan seterusnya. Subsistem tersebut memiliki hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (interconnectedness). Pemahaman mengenai pariwisata sebagai suatu sistem tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak aktor yang terlibat serta memiliki peran dalam menggerakkan sistem pariwisata. Aktor-aktor tersebut, baik individu maupun kelompok, disebut pula sebagai insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor yang terkait dengan pariwisata. Secara umum, insan-insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Pilar masyarakat merujuk pada masyarakat umum yang ada pada destinasi atau lokasi wisata, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Termasuk didalamnya tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media massa. Pilar selanjutnya adalah pilar swasta yaitu asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata.

Sektor pariwisata adalah salah satu sektor terbesar di dunia sebagai pembangkit ekonomi, namun keberadaan dari pariwisata sangat rentan terhadap bencana baik yang disebabkan oleh perilaku manusia maupun bencana yang disebabkan oleh alam. Menurut Henderson (Zaenuri 2016) pariwisata merupakan industri yang selalu “dihantui” oleh

bencana dan krisis, bahkan bias dikatakan sangat rentan karena mudah dipengaruhi oleh perubahan-perubahan maupun kejadian-kejadian yang ada disekelilingnya. Pariwisata menurut pendapat dari Krapf dan Hunziker (susilawati 2016) adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang diakibatkan perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang hanya sementara.

5. Pariwisata Budaya

Pariwisata budaya dapat dilihat sebagai peluang bagi wisatawan untuk mengalami, memahami, dan menghargai karakter dari destinasi, kekayaan dan keragaman budayanya. Pariwisata budaya memberikan kesempatan kontak pribadi secara langsung dengan masyarakat lokal dan kepada individu yang memiliki pengetahuan khusus tentang sesuatu objek budaya. Tujuannya adalah memahami makna suatu budaya dibandingkan dengan sekedar mendeskripsikan atau melihat daftar fakta yang ada mengenai suatu budaya.

Sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Bangunan bersejarah, situs, monument, museum, galeri seni, situs budaya kuno.
2. Seni dan patung kontemporer, arsitektur, testil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film dan penerbit.
3. Seni pertunjukan, drama, sendratari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi, festival, dan event khusus lainnya.
4. Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs dan sejenisnya.

6. Tujuan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan kemampuan bisnis dari pihak swasta. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah maupun masyarakat, maka pengembangan bisnis pariwisata yang dijalankan oleh pihak swasta tidak dapat berjalan lancar. Begitu pula pengembangan pariwisata yang hanya dikelola oleh pemerintah, tanpa melibatkan pilar lainnya. Pemerintah akan mengalami kesulitan dalam peningkatan investasi dan modal dalam pengembangan pariwisata tersebut. Namun, hal yang paling penting adalah keterlibatan dari pilar masyarakat yang selama ini sering kali diabaikan dalam pengembangan pariwisata. Akibatnya masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah atau destinasi wisata sering

kali tidak ikut merasakan manfaat dari pengembangan pariwisata di sekitar mereka. Jikapun terlibat maka peran yang mereka jalankan sangat minimal sehingga tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Pada beberapa kasus, masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata hanya menjadi penonton sementara pada saat yang sama mereka terkena berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang negatif akibat dari pengembangan wisata di daerah mereka (Anuar dan Sood, 2017).

Kondisi tersebut memunculkan pandangan tentang pentingnya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa terdapat lima pendekatan dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah the community approach atau pendekatan kemasyarakatan atau komunitas. Untuk memahami pendekatan komunitas ini akan digunakan pemahaman mengenai pengembangan masyarakat atau community development.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang bersifat analisis deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dengan berfokus pada suatu untuk diamati, kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, wawancara dengan narasumber terkait, dokumen dan laporan. Analisis secara deskriptif, yaitu data yang didapat dalam penelitian akan dijabarkan secara sistematis sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi dilapangan kemudian dilakukan analisis secara cermat terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat mengenai penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kolaborasi Pengembangan Pariwisata Pacu Jalur Berbasis Masyarakat di

Kabupaten Kuantan Singingi

1. Motivasi Bersama

Para masyarakat dalam observasi dan wawancara masih belum berperan dengan baik pada pengunjung yang datang dari daerah yang jauh. Seperti tarif parkir dan tarif masuk tribun yang cukup menguras kantong, area toilet umum yang kurang terawat dan terlihat tidak dijaga kebersihannya. Peran mereka masih kecil dan hanya sebatas

menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka, bukan dimotivasi oleh semangat dan minat bersama untuk mensukseskan event pariwisata yang dapat mendorong perkembangan pariwisata Pacu jalur.

Akademisi merupakan stakeholder dari perguruan tinggi yang ahli dalam bidangnya. Dalam hal ini akademisi melakukan dan membuat suatu kegiatan dengan melihat dari teori-teori yang ada, hal ini pihak akademisi memberikan pengetahuan mengenai suatu konsep atau teori-teori terbaru yang relevan yang dapat dikembangkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Dalam segi manajemen perencanaan merupakan salah satu bagian dari manajemen, seperti membuat planning, perencanaan awal, atau langkah kerja awal dalam penyusunan suatu rencana yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Organizing yaitu proses dalam mengatur jalannya suatu pekerjaan seperti pengaturan jadwal, melakukan pengelompokan, dll, Actuating yaitu mengimplementasikan yang sudah direncanakan dan dijadwalkan sesuai dengan hal yang sudah direncanakan sebelumnya dan hal ini menjadi langkah terpenting untuk mencapai kesuksesan. Controlling adalah suatu hal yang dilakukan untuk memastikan alur kerja apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum terealisasi. Akademisi juga sebagai aktor yang sering terlibat dalam kebijakan, memiliki kepakaran dan merupakan lembaga penelitian yang berperan dalam implementasi kebijakan. Dalam pembangunan pariwisata, akademisi dalam hal ini perguruan tinggi dan lembaga penelitian memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat berbasis pengetahuan. Namun penelitian dan pengabdian tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti kurangnya inovasi atau pembaruan dalam pengembangan pariwisata pacu jalur.

Selanjutnya, peran dari media untuk mempublikasikan atau mempromosikan perlahan juga telah bekerja sama dengan berbagai media menggunakan internet.

2. Saling Percaya

Dalam segi manajemen perencanaan merupakan salah satu bagian dari manajemen, seperti membuat planning, perencanaan awal, atau langkah kerja awal dalam penyusunan suatu rencana yang berguna untuk mencapai suatu tujuan. Organizing yaitu proses dalam mengatur jalannya suatu pekerjaan seperti pengaturan jadwal, melakukan pengelompokan, dll, Actuating yaitu mengimplementasikan yang sudah direncanakan dan dijadwalkan sesuai dengan hal yang sudah direncanakan sebelumnya dan hal ini menjadi langkah terpenting untuk mencapai kesuksesan. Controlling adalah suatu hal yang dilakukan untuk memastikan alur kerja apakah

sudah sesuai dengan rencana atau belum terealisasi. Akademisi juga sebagai aktor yang sering terlibat dalam kebijakan, memiliki kepakaran dan merupakan lembaga penelitian yang berperan dalam implementasi kebijakan. Dalam pembangunan pariwisata, akademisi dalam hal ini perguruan tinggi dan lembaga penelitian memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat berbasis pengetahuan. Namun penelitian dan pengabdian tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan, seperti kurangnya inovasi atau pembaruan dalam pengembangan pariwisata pacu jalur.

Selanjutnya, peran dari media untuk mempublikasikan atau mempromosikan perlahan juga telah bekerja sama dengan berbagai media menggunakan internet. Motivasi media untuk mempublikasikan juga telah dibuktikan melalui situs-situs internet yang mempublikasikan siaran live streaming pada media youtube. Pengambilan gambar oleh komunitas fotografer kuantan singingi yang juga di unggah pada sosial media instagram.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

1. Mengenai kolaborasi pengembangan pariwisata pacu jalur berbasis masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi ini diketahui bahwa tata kelola kolaboratif melalui model pentahelix dalam pengembangan pariwisata Pacu jalur, Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan cukup optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui produk kebijakan yang diterbitkan tentang pengembangan kawasan wisata Pacu jalur. Walaupun kebijakan yang dikeluarkan hanya berasal dari Pemerintah Pusat, namun setidaknya dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengimplementasikannya atau membuat turunan kebijakan yang lebih teknis dalam pengembangan pariwisata Pacu jalur. Komitmen dan legitimasi mereka harus didukung oleh motivasi bersama, saling pengertian dan saling percaya dari para pelaku dalam pengembangan pariwisata Pacu jalur.
2. Faktor-faktor yang menghambat kolaborasi pengembangan pariwisata pacu jalur berbasis masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya koordinator pentahelix dalam pengembangan pariwisata Pacu jalur

Komunikasi diperlukan sebagai koordinasi sistem pariwisata melalui optimalisasi peran pemerintah, pelaku bisnis, para akademisi, komunitas dan media untuk membangun pariwisata pacu jalur, tentu akan semakin tertata dan teratur baik dari pengunjung, pedangan dan semua yang berpartisipasi didalamnya tetapi para pihak masih belum saling berkoordinasi untuk memperlancar kerja sama dalam pariwisata ini.

b. Kurangnya dukungan akses infrastruktur jalan dalam pengembangan pariwisata Pacu jalur

Infrastruktur yang masih kurang menjadi salah satu penghambat dalam kolaborasi pengembangan pariwisata pacu jalur berbasis masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dapat dilihat dari akses jalan karena masih ada beberapa titik jalan yang masih rusak, selain itu juga sarana wc umum bagi para pengunjung, toilet umum perlu dibuat dalam beberapa titik arena agar para pengunjung yang datang tidak kerepotan karna kesusahan mencari toilet umum.

c. Rendahnya kreativitas dan inovasi di lokasi wisata Pacu jalur

Kreativitas dan inovasi dalam pariwisata pacu jalur ini masih rendah, oleh karena itu diharapkan meratanya perbaikan di setiap arena pacu jalur. Kemudian inovasi untuk pentas seni dalam mengenalkan budaya rantau kuantan kepada generasi muda juga perlu diperhatikan, sebab mereka adalah penerus masa depan Kabupaten Kuantan Singingi.

Saran

Saran dari penulis pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain yaitu bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan yang menunjang pengembangan pariwisata pacu jalur di Kuantan Singingi berjalan optimal. Kemudian untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, melalui penelitian ini dapat dijadikan evaluasi sehingga dapat meningkatkan upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan obyek wisata pacu jalur menuju event Nasional. Kemudian lebih berusaha dalam menjalin kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan destinasi pariwisata khususnya pacu jalur. Bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi baik yang tinggal dikawasan wisata atau pun tidak untuk saling bekerja

sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi pariwisata pacu jalur ini. Dimana masyarakat merupakan salah satu pilar dalam pembangunan kepariwisataan.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, I.R. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adi, I.R. (2017). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas. Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta : FISIP UI Press.
- Afdal, 2015. Kolaboratif: Kerangka Kerja Masa Depan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*. Vol.3 No.2.
- AG, Subarsono., 2011., *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi.*, Pustaka Pelajar., Yogyakarta.
- Ansell, C. dan Alinson G. 2007. Collaborative governance In Theory And Practive. *Journal Of Public Administration*. University of California berkeley.
- Ansell, C. dan Alinson, G. 2012. Stewards, Mediator, and Catalyst: Tower A Model Of Collaborative Leadership. *The Inoviation Journal*. Vol.17 No.1.
- Anuar, A.N.A. & Sood, N.A.A. (2017). Community based tourism: Understanding, benefits and challenges. *Journal of Tourism and Hospitality*, 6(1).
- Afdal, 2015. Kolaboratif: Kerangka Kerja Masa Depan, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*. Vol.3 No.2.
- Donahue, John D. and Richard J. Zeckhauser. 2011. *Collaborative Governance: Private Roles for Public Goals in Turbulent Times*. Princeton: Princeton University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T. and Balogh, S. (2012), “An integrative framework for collaborative governance”, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 22 No. 1, pp. 1-29.
- Lokantara, I Gede Wyana, Rafi’I Muhammad. 2017. Identifikasi Tipologi Destinasi Wisata Dan Strategi Pengembangannya Sebagai Upaya Mewujudkan Pariwisata Kabupaten Karangasem Berbasis Wisata Konservasi. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & call For Papers Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3) 2017*. ISBN:9-7-89-7936-499-93
- Nawawi, Ahmad, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangkritis. *Jurnal nasional pariwisata*. Vol.5 No.2.
- Nugroho, Riant., 2006., *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang.*, PT. Elex Media Komputindo., Jakarta.
- Phillips, R. & Pittman, R. (2009). *An Introduction to Community Development*. Routledge.
- Pitana, I.G. & Gayatri, P.G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Purwanto, Erwan Agus dkk., 2015. *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan.*, Gadjah Mada University Press., Yogyakarta.
- Putra, A., Hasim, A dan Adiando (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Objek Wisata di Rupal Utara Kabupaten Bengkalis. *Journal Publicuho*. 5(4), 1149-1161.

- Sambodo Giat Tri. 2016. “pelaksanaan collaborative governance di desa budaya brodot, galur, kulonprogo, DIY”, Jurnal ilmu pemerintahan dan kebijakan publik. 3(1).
- Sanders, I.T. (1970). The Concept of Community Development. Community Development as a Process. Leo J. Cary. (Ed.).
- Susilawati 2016. “strategi pengembangan pariwisata pantai bira sebagai sumber unggulan pendapatan asli didaerah kabupten bulukumba”. Jurnal Administrasi Negara. Vol.2 No.3.
- Syafri, Wirman., 2012. Studi Tentang Administrasi Publik., Erlangga., Jatinangor.
- Suwardi. (2007). Bahan Ajar Kebudayaan Melayu. Pekanbaru: Kampus Akademi Pariwisata Engku Puteri Hamidah.
- Tahir, Arifin. 2015., Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah., Alfabeta. Bandung.
- Zaenuri, Muhammad. 2016. Tata kelola pariwisata-bencana dalam perspektif collaborative governance (studi kasus pariwisata-bencana lava tour merapi kabupaten selemang)